

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah Kota maupun Pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program dapat berjalan semestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat, untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Penelitian ini mengangkat tema mengenai Faktor-Faktor Penghambat dalam Proses Partisipasi Masyarakat di Desa Onolimbu You. Perencanaan partisipatif sebagai perencanaan yang melibatkan semua masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yang dalam tujuan dan prosesnya melibatkan rakyat dan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan masyarakat. Adapun yang menjadi titik focus dalam penelitian ini adalah factor-faktor penghambat dalam partisipatif.

Musrembang adalah focus perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga Publik yaitu Pemerintah Desa, bekerjasama dengan rakyat dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun diluar Desa. Adanya kebijakan pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), semakin menuntut setiap lembaga tersebut untuk berperan dalam berpartisipasi lebih luas, dengan cara hadir langsung pada Musrembang tersebut. Kehadiran lembaga baik sekretariat dan Dinas maupun Lembaga teknis daerah dilingkungan Pemerintah Kecamatan Mandeh Barat semakin urgen, vital dan strategis sebab kegiatan tersebut menjadi momentum pertemuan antara usulan atau ide pikiran para stakeholder yakni masyarakat dan birokrat untuk melakukan diskusi, tukar pikiran, menampung saran kemudian merumuskan dan menyepakati program dan kegiatan yang digandakan melalui formulasi yang ada di kecamatan Mandeh Barat.

Yang mendasari segala ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Struktur dan Tata Pemerintahan Desa yang pertama-tama adalah pasal 18 UUD 1945, bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.⁴

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana kerja pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan dengan pertimbangan

⁴I Nyoman Beratha, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Mataram:Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 28

kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, peogram prioritas pemabngunan Desa, rencana kerja dan pendanaan sertaprakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintahan Desa.

Masyarakat ikut serta bepartisipasi dalam hal Musrembang yang dilakukan oleh pemerintah Desa sehingga dalam hal ini masyarakat ikut serta dalam pembangunan Desa, pentingnya partisipasi masyarakat menegaskan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa adanya ini, maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa melibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan atau proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat mempunyai hak dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut.

Hal ini memberikan arti bahwa masyarakat harus ikut aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dana sebagai upaya pencapain pembangunan

desa yang maju. Dengan demikian sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam mendukung, mengembangkan dan meningkatkan pembangunan desa yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan catatan resmi dan Pola Gerak Operasional Pembangunan Desa (SK Mandegri no.42 tahun 1969) menyatakan bahwa “pembangunan Desa adalah usaha pembangunan masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh”.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik perlu adanya Perencanaan partisipatif sebagai perencanaan yang melibatkan semua rakyat dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yang dalam tujuan dan prosesnya melibatkan rakyat dan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan. Minat dan perhatian menggunakan metode perencanaan partisipatif diberbagai Negara kiranya cukup beralasan, sebuah metode tersebut mempunyai karakteristik seperti terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipasi (keterlibatan), dinamis, sinegritas, legalitas, serta fasibilitas (realistis). Dalam pembangunan perencanaan partisipatif juga memiliki criteria yang jelas antara lain adanya pelibatan seluruh stakeholder, adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate, adanya proses politik melalui upaya negosiasi atau rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement), serta adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

Manfaat yang diadakan pemerintah dalam melakukan partisipatif pada pembangunan di desa Onolimbu You, “Pembangunan bertumbuh pada masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan partisipatif yang dalam hal ini tiap-tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan permasalahan dan perumusan kebutuhan, perencanaan dan program, pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara pelaku yang terlibat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan sangat membantu pemerintah dalam kendala yang mungkin terjadi dapat dipecahkan bersama-sama sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat”.

Manfaat partisipatif masyarakat bagi pemerintah adalah:

1. Menghemat tenaga kerja dan dana pembangunan
2. Mempromosikan pembangunan social ekonomi melalui peningkatan kepercayaan diri masyarakat
3. Menjadi modul secara politis dengan cara menunjukkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan politik dan social dengan cara memperkuat kepemimpinan masyarakat
5. Organisasi masyarakat yang kuat dapat menjamin keberlangsungannya

Sedangkan manfaat yang diperoleh masyarakat melalui partisipatif masyarakat adalah:

1. Hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan local dan organisasi masyarakat

3. Secara moral masyarakat merasa memiliki sehingga terjaga kelestariannya dan merupakan bagian pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah.
4. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat.

Dampak buruknya jika pembangunan tanpa partisipasi pada masyarakat di Desa Onolimbu You:

1. Pemerintah daerah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakatnya.
2. Investasi yang di tanamkan di daerah tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan warga
3. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat tidak tertangkap
4. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang tidak tepat
5. Fasilitas-fasilitas yang ada di gunakan dibawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵

⁵ Noverman Duadji, *Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal .52

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembanguna tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Bahkan banyak kasus yang menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan keadaan itu dapat terjadi oleh beberapa sebab, antara lain:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil atau tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang mampu memahami hal itu.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu.
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikuti sertakan.⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa masih belum optimal, perbedaan tersebut memunculkan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat di desa Onolimbu You bisa terealisasi sebagaimana mestinya.

Kemampuan Kepala Desa juga sangat diperlukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka lebih termotivasi dalam berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Untuk mendorong terwujudnya partisipatif masyarakat, pemerintah desa harus mampu bersinergi dalam merencanakan program dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai social yang sudah ada. Sehingga dalam menjalankan program-program pembangunan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mampu menciptakan partisipasi masyarakat yang kuat terhadap pembangunan Desa.

⁶Noverman Duadji, *Ibid. hal. 51*

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi kasus di Desa Onolimbu You, Kecamatan Mandehe barat, kabupaten Nias Barat)”**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka permasalahan yang di atas menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Onolimbu You?
2. Apa faktor-faktor penghambat partisipatif dalam penyelenggaraan Musrembang di Desa Onolimbu You?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif mengenai peraturan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Onolimbu You, Kecamatan Mandehe Barat, Kabupaten Nias barat.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Onolimbu You, Kecamatan Mandehe barat, Kabupaten Nias barat.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan manfaat kepada semua pihak secara umum, yaitu:

1. Bagi Penulis, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir setiap gejala dan Permasalahan yang di hadapi di lapangan.
2. Bagi pemerintah Desa Onolimbu You, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran kepada pemerintah Desa Onolimbu You dalam pelaksanaan pembangunan Desa untuk mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagi fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas HKBP Nommensen Medan, bermanfaat dalam memperkaya bahan referensi ilmiah khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi sangat luas, para pakar ilmuwan berbagai macam mengartikan partisipasi menurut disiplin ilmunya masing-masing, secara etimologi kata partisipasi sebagai berikut:

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun dalam bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.⁷

Pengertian partisipasi menurut asal usul kata sebagaimana dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa partisipasi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil bagian atau peran dalam suatu kegiatan bersama. Secara harafiah partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat didefenisikan secara luas

⁷ id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi.(Diakses tgl. 26 juni 2019)

sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dirinya (interistik) dalam keseluruhan proses kegiatan itu.

Masyarakat yang merupakan indikator penting dalam suatu pembangunan dimana pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Karenanya peran pemerintah dalam pembangunan tidak hanya melalui investasi langsung pemerintah, tetapi juga bahkan semakin penting dan besar peranannya melalui kebijaksanaan pembangunan yang mendorong berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵

Menurut dia masyarakat itu terletak pada kelompok manusia yang bebas dan bersifat kekal, menempati kawasan tertentu, memiliki kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan di antara anggota-anggotanya.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga Negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyampaikan pendapat dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945.⁶

Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai *input* bagi keluarga. Keluarga sebagai tempat terprosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil *output* dari proyeksi tersebut. Individu yang berbeda dalam suatu masyarakat tertentu berarti ia berada pada suatu konteks budaya tertentu. Pada tahap inilah arti keunikan individu itu

⁵Ginandjar Kartasasmita, *administrasi pembangunan*, Jakarta:Pustaka LP3ES, 1977, hal. 153

⁶[\(diakses tanggal 26 juni 2019\)](http://m.detik.com/news/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat)

menjadi jelas dan bermakna, artinya akan terlihat individu sebagai perwujudan dirinya sendiri dan merupakan makhluk social sebagai perwujudan anggota kelompok atau anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat rela dan ikut serta dengan senang hati dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa apabila ada yang menggerakkan dan membangkitkan. Membangkitkan partisipasi masyarakat berarti memberi dorongan kepada masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi. Seseorang atau kelompok orang bersedia melakukan sesuatu jika yang dikerjakannya member manfaat bagi dirinya atau kelompoknya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya bahwa partisipasi masyarakat adalah “keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan keedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya”.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan fungsionalisasi dari semua potensi yang ada, baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia pada situasi dan kondisi yang kondusif yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ketersediaan masyarakat desa untuk mengambil bagian penyelenggaraan suatu program pembangunan adalah merupakan indikasi adanya kemampuan awal dari masyarakat untuk berkembang

secara mandiri. “Partisipasi masyarakat terutama masyarakat pedesaan dalam pembangunan menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Dan partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan”.⁷

Dari beberapa pengertian partisipasi masyarakat dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan kelompok masyarakat dalam membangun mulai dari perencanaan dengan penentuan arah dan strategi kebijakan pembangunan didalam memasuki tahapan proses pembangunan desa dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan sudah merupakan kewajiban warga Negara Indonesia, karena pada prinsipnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan ide-ide guna mengsucceskan program pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian halnya di wilayah pemerintah daerah di Kabupaten Nias barat kecamatan Mandehe barat khususnya di Desa Onolimbu You sebagai focus penelitian partisipasi tersebut dapat disampaikan dalam forum Musrembang dan pada rapat-rapat Desa lainnya. Dengan demikian masyarakat ikut merasakan memiliki hasil-hasil pembangunan dan ikut memikul beban pembangunan berupa tanggungjawab bersama dalam pemeliharaan pembangunan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ada tiga aspek yang harus dilakukan pemerintah sebagai berikut:

⁷ Koentjaraningrat, *kebudayaan mentalis dan pembangunan*, Jakarta:Gramedia, 1992, hal. 79

1. Melibatkan masyarakat dan mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya, meningkatkan kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan system yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.
2. Menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas dari perencanaan dan keputusannya
3. Meningkatkan rasa kebersamaan *sense of community* dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Aspek-aspek tersebut dilakukan oleh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat agar pembangunan desa tetap berkesinambungan, maka pembangunan itu harus dilaksanakan secara berencana. Jadi sudah jelas bahwa bentuk dan jenis partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh beberapa pakar diatas adalah partisipasi yang mempunyai hubungan antara satu sama lainnya. Dalam hal ini masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengambil keputusan mulai dari awal perencanaan pembangunan sampai menerima kembali hasil pembangunan tersebut.

2.1.2 Proses Partisipasi Masyarakat

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal ini penting guna mematangkan apakah program yang direncanakan telah dianalisis secara cermat dan mendalam tentang kondisi social budaya dan alam setempat sehingga program-program tersebut benar-benar menyentuh kepentingan kebutuhan dan menjawab permasalahan

masyarakat. Sosialisasi ini penting tahapan-tahapan peran aktif masyarakat terlaksana secara efektif.

Proses partisipasi atau peran aktif masyarakat meliputi empat tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (perencanaan)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Tahap pertama yaitu tahap pembuatan keputusan (perencanaan) mempunyai landasan filosofi bahwa orang akan merasa dihargai jika mereka diajak untuk berkompromi, memberikan pemikiran-pemikiran dalam membuat suatu keputusan untuk membangun diri, lingkungan, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Keikutsertaan anggota/masyarakat didalam pengambilan keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut ikut bertanggungjawab dalam melaksanakan, mengamankan setiap paket program yang dikomunikasikan. Mereka merasa memiliki serta bertanggung jawab secara penuh atas keberhasilan program yang dilaksanakan.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, memiliki landasan filosofi bahwa tujuan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan adalah agar masyarakat mengetahui secara baik tentang cara-cara melaksanakan program sehingga nantinya mereka dapat secara mandiri mampu melanjutkan, meningkatkan serta melestarikan program pembangunan yang dilaksanakan.

Tahap ketiga yaitu tahap pemanfaatan hasil, artinya tahapan ini lebih menekankan pada pemanfaatan program pembangunan yang diberikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat diwilayah yang bersangkutan.

Tahapan keempat yaitu tahapan dalam evaluasi, masyarakat diarahkan untuk mampu menilai sendiri dengan mengungkapkan tentang apa yang mereka tahu dan lihat. Mereka diberi kebebasan untuk menilai sesuai yang ada didalam benaknya, pengalaman, kelebihan dan kekurangan dari program, kelemahannya, manfaat, hambatan, factor pelancar yang mereka hadapi dalam operasionalisasi program dan secara bersama-sama mencarikan alternative terbaik sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan di waktu yang akan datang.

Pendapat diatas menjadi acuan penetapan indikator dalam penelitian factor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun tidak sepenuhnya digunakan sebagai indicator partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat factor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembagunan desa sehingga untuk pemanfaatan tidak digunakan sebagai indicator, sedangkan untuk partisipasi dan evaluasi pembangunan dapat digantikan partisipasi dalam pengawasan, sebab prinsip evaluasi dalam suatu proses terkait erat dengan pengawasan.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental atau emosi serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Dari hal tersebut mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang baik
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
5. Memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan masyarakatnya.⁸

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud)
misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan.
2. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak)
Misalnya partisipasi buah pikiran, partisipasi social, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha untuk pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja dan perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Sedangkan partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang

⁸ Id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi

membutuhkan dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan untuk mewujudkannya. Misalnya arisan, menghadiri acara duka, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama, sedangkan partisipasi representative dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau kepanitiaan.

2.1.4 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Bahwa partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi yaitu:

- a. Lebih menginginkan diperolehnya keputusan yang benar karena banyaknya sumbangan yang berarti dan positif.
- b. Mengedepankan komunikasi dua arah sehingga baik bawahan maupun atasan memiliki kesempatan bersama dalam mengajukan pemikiran.
- c. Mendorong kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama
- d. Melatih dan bertanggung jawab serta mendorong untuk membangun kepentingan bersama
- e. Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan menuntut adanya suatu perubahan dalam segala bidang untuk mengarah ke suatu yang lebih baik dari semula. Pembangunan desa yang dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan serta untuk meningkatkan kehidupan yang mandiri serta menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat desa agar pembangunan itu dapat efektif dan efisien penyelenggaraan administrasi desa harus ditingkatkan, dengan kelancaran administrasi desa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan.

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Pembangunan berupa batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat. Dan terakhir adalah pembangunan yang kemajuan meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.⁹

Sesungguhnya proses pembangunan memerlukan keterpaduan, keserasian dan kelelasan dalam pembangunan dibutuhkan pendukung yaitu sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) serta pemodalan dan teknologi. Ketiga komponen ini sama – sama memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, masyarakat adil dan makmur, perlu diingat bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Dalam pembangunan nasional bahwa mengutarakan pembangunan bertujuan:

1. Harus menguntungkan rakyat
2. Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
3. Harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaannya

⁹ Emil Samil, *pembangunan berwawasan lingkungan*, Jakarta:LP3ES, 1986, hal. 3

4. Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan pembangunan yang diinginkan yaitu meletakkan landasan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tercapainya masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan pancasila pembangunan nasional sangat ditentukan keberhasilan pembangunan daerah yang didukung pula keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan yang terjadi bukan merupakan kegiatan yang bersifat insidental atau kebetulan tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang dilaksanakan secara terus menerus, sadar dan terencana yang berorientasi pada pertumbuhan.

2.2.2 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan social. “Ditinjau dari segi istilah sebenarnya pembangunan desa identik dengan pembangunan masyarakat desa. Bahwa sejak lahirnya istilah pembangunan masyarakat bahwa mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang historis, sosial, ekonomi, cultural, dan spiritual”.¹⁰ Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan.

¹⁰ I. Nyoman Beratha, *Desa, masyarakat desa dan pembangunan Desa*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hal. 71

Jumlah penduduk yang besar pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan disuatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itu lah memungkinkan untuk bisa mengolah potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan maksimal dengan tetap menjaga kelesarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat luas suatu bangsa secara terus menerus dan dalam waktu yang mencakup antargenerasi berkelanjutan pembangunan menunjuk pada kemampuan untuk tumbuh dan berubah terus menerus agar masyarakat menikmati kesejahteraan sekurang – kurangnya sama dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi.

Dari pengertian pembangunan berkelanjutan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang dan tetap menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga karena kelestarian lingkungan yang tidak di jaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang.

2.2.3 Pengertian Desa

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan daerah otonom yang selanjutnya

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

“Desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama yang terdiri dari kumulan masyarakat yang hamper semuanya saling mengenal dan mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, terdiri dari pertanian, perikanan dan sebagainya. Dan dalam satu wilayah tersebut terdapat ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.¹¹ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas desa merupakan suatu wilayah hukum dan dihuni oleh sekelompok masyarakat yang berada di kabupaten yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan berada dibawah pemerintah kecamatan. Masyarakat desa adalah masyarakat yang majemuk sehingga memiliki adat – istiadat yang berbeda – beda namun merupakan modal dari perkembangan. Dan kepala desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyusun segala rencana dan kegiatan pembangunan didesanya berdasarkan kondisi desa masing – masing. Dengan harapan bahwa segala bentuk pembangunan yang ada di desa dapat menyentuh sendi – sendi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan

¹¹ I. Nyoman Beratha, *Desa, masyarakat desa dan pembangunan Desa*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, hal. 26

diharapkan dapat berjalan dengan baik secara efektif dan efisien baik dalam menggunakan tenaga, waktu serta dana anggaran pembangunan yang tersedia. Untuk mencapai arah tujuan pembangunan, aparat pemerintah desa dituntut mampu menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan desa serta dalam melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargai peran aktif masyarakat, bersamaan dengan upaya menciptakan kondisi yang lebih mendorong peningkatan kehidupan dan tanggung jawab masyarakat serta kemampuan kelembagaannya. Hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan administrasi pembangunan desa dapat dijalankan dengan baik.

2.2.4 Pengertian Pembangunan Desa

“Kebanyakan desa di Indonesia baik yang terbentuk dari desa nelayan atau petani sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu. Dalam uraian ini kita mendefinisikan desa sebagai satu daerah kesatuan hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan umumnya mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial satu sama lain. Hidup serta tinggal menetap disatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu kepala desa atau dengan sebutan lain menurut daerahnya. Kehidupan penduduk desa umumnya tergantung dari usaha pertanian atau nelayan dan diselingi dengan usaha kerajinan tangan dan dagan kecil – kecilan”.¹²

Hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan pergerak pembangunan. “ pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus

¹² B.N. Marbun, *Proses pembangunan Desa*, Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 9

menerus sistematis dan terarah pada sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh”.¹³

Berdasarkan pengertian di atas bahwa keberhasilan pembangunan tergantung dari pada masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat dengan hati nurani bersedia untuk memajukan desa tanpa menunggu perintah dari pemerintah, maka tingkat kesejahteraan mereka akan tercapai. Dalam pelaksanaan pembangunan ini pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitas dan bantuan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia dengan arahan kebijakan pembangunan yang telah di gariskan oleh PROPENAS. Pembangunan desa sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang penting yaitu strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah negara kesatuan RI. Keberhasilan pembangunan desa merupakan salah satu bentuk peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya yang menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Dari beberapa pengertian diatas pembangunan desa merupakan suatu perubahan, pengembangan dari yang semula tidak ada menjadi ada melalui suatu proses mempertinggi taraf hidup dan pemerataan pembangunan dengan penyediaan prasarana dan sarana yang direncanakan kearah perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa. Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan

¹³ I. Nyoman Beratha, *Ibid*, hal. 72

kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari konteks keberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Secara sederhana pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat pemanfaatan akses dan kontrol atas sumber daya – sumber daya yang penting bagi kehidupan dan penghidupannya.

Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 dan keputusan dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (desa otonom) sebagai otonom yang asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program – program kinerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

Apabila otonomi desa benar – benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensi ke kota untuk menyerbu lapangan pekerjaan disektor – sektor informal. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi dengan baik berupa kelembangaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan yang berdasarkan atas kerakyatan diyakini merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema – dilema pembangunan yang dihadapi terutama adanya penyimpangan yang beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal

dari atas lebih sempurna dari pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah. Hal ini berakibat kebijaksanaan – kebijaksanaan pembangunan kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata di pihak masyarakat.

2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

2.3.1 Perencanaan Partisipasi Pembangunan

Dalam kamus management karangan Moekijat menyebutkan ada beberapa pengertian perencanaan yaitu bahwa “perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan duga-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.”¹⁴

“Perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan jenis top-down dan booton-up planning, vertical dan horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Uraian tersebut masing-masing jenis itu di urutkan sebagai berikut:

1. Perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi
2. Perencanaan alokatif dan perencanaan inivatif
3. Perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal
4. Perencanaan bertujuan jelas dan perencanaan bertujuan laten
5. Perencanaan indikatif dan perencanaan imperative
6. Top-down dan botton up planning

¹⁴ Robinson Tarigan M.R.P, *Perencanaan Pembangunan wilayah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2005, hal 4

7. Vertical dan horizontal planning
8. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung”.¹⁵

Pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang dan mencerminkan segala potensi yang dimiliki oleh desa dan harus merupakan titik temu antara program dari atas dan program dari bawah, artinya bahwa pembangunan desa tidak lepas dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang meliputi pendekatan top-down dan bottom up, di atas kertas nampaknya akan menjamin keseimbangan prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi, karena proposal yang diajukan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi menjadi prioritas yang paling utama, tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh pemerintahan yang tingkatnya rendah.

“Dalam implementasi perencanaan daerah, ternyata banyak masalah yang muncul. permasalahan lain yang sering muncul dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Propenas dan propeda bukanlah rencana yang kontinu sebab hanya dipersiapkan lima tahun sekali. Seperti halnya dengan poldas, perencanaan tersebut tidak menjelaskan out-put dan hasil serta tidak berhubungan dengan anggaran, kendati defenisinya secara umum sebagai program pembangunan.
2. Masih belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana dan kapan perencanaan terintegrasi.
3. Perencanaan dilapangan menunjukkan kesenjangan yang besar dalam memperhitungkan kemampuan financial
4. Perencanaan tersebut selalu memfokuskan dari pada anggaran dan proyek pembangunan dari pada memandang anggaran secara keseluruhan”.¹⁶

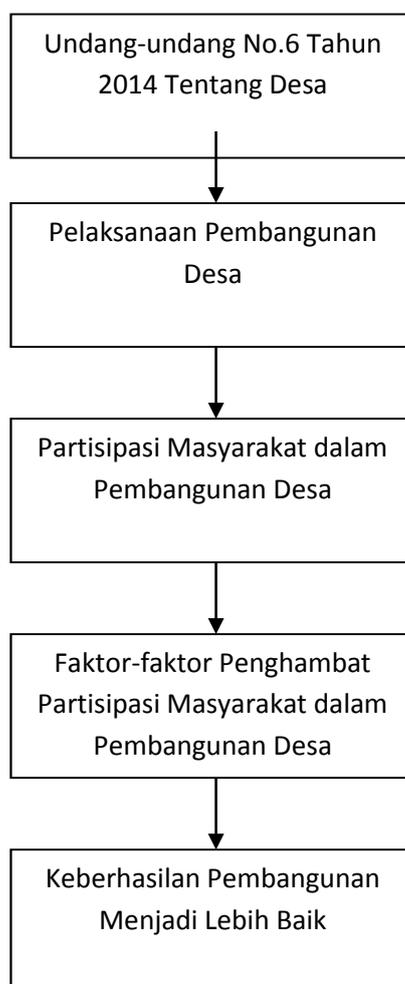
¹⁵ Robinson Tarigan M.R.P, *Ibid, hal. 13-18*

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Sugyono, kerangka berfikir merupakan “model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.¹⁷ Untuk itu penulis menggunakan kerangka berfikir dalam penelitian ini seperti gambar dibawah:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



¹⁶ Mudrajad Kuncoro, Ph.D, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2004, hal. 58

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 60

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

Metedologi Penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian. Metedologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.¹⁸

3.1. Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁹ Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan yang Harrison berpendapat bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai paradigma.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan

¹⁸ Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2013, Hlm. 17.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 04

perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²⁰ Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.²¹

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, Hlm. 15

²¹ Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, Hlm. 25

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kantor Kepala Desa Onolimbu You Kecamatan Mandehe Barat, Kabupaten Nias Barat.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan penelitian adalah implementor dari kebijakan yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari:

1. Informan Kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti.
2. Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan, merupakan mereka yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan- catatan atau dokumentasi-dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.²²

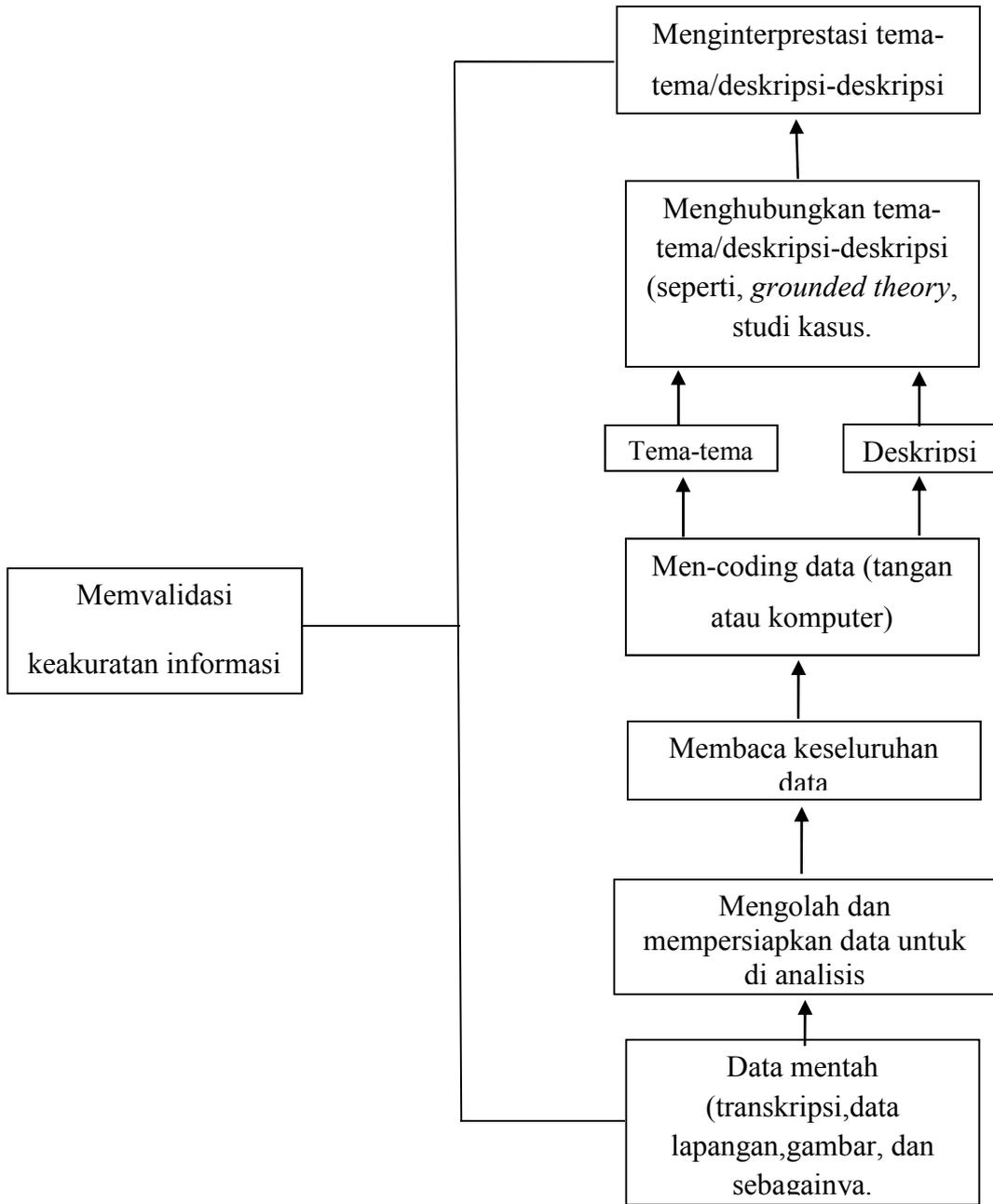
Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

²²Afifudin dan Beni Ahmad. Saebani, *Metode Penelitia Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, Hlm. 145.

- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman S Rallis,1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1.1 Teknik Analisis Data²³



Sumber : Buku Jhon W. Creswell Edisi Ketiga (2013:

277)

²³ John W. Chreswell, Op.cit. Hlm. 277.